

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh  
INDRIANA  
NIM 105730408813**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh  
INDRIANA  
NIM 105730408813**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

## **MOTTO HIDUP**

(QS. Muhammad:7)

“Hidup di jalan-Nya atau mati syahid”

Setiap manusia punya mimpi

Mimpi menjadi sukses

Sukses itu bukan sebatas kaya

Kaya dalam artian banyak uang

Uang bukanlah segalanya

...

Tapi Sukses itu adalah kebahagiaan

jika kamu bahagia maka kamu sudah Sukses

...

“Hidup di dunia intelektual bagaikan fatamorgana, tapi hidup di dunia penemuan jati diri bagaikan manusia yang bertemu dengan Tuhan-Nya ”



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nama Mahasiswa : INDRIANA  
No. Stambuk/NIM : 105730408813  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dan di Seminarkan Pada 9 Mei 2018

Makassar, Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing I  

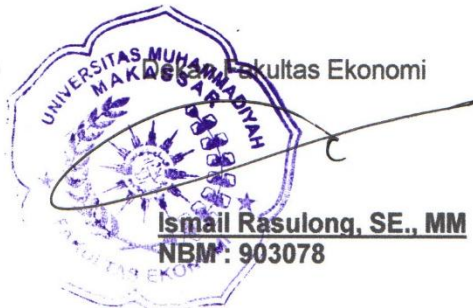

Dr.H.Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak. CA  
NIDN : 0916096601

Pembimbing II



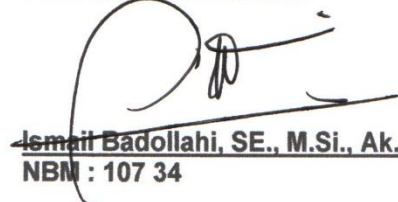
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak  
NBM : 1073428

Mengetahui,

  
Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.  
NBM : 107 34

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Indriana, NIM : 105730408813, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : .....M, Tanggal ...../.....M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

.....H  
Makassar,-----  
.....M

### PANITIA UJIAN

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Pengawas Umum : | (.....)    |
| 2. Ketua :         | (.....)    |
| 3. Sekretaris :    | (.....)    |
| 4. Penguji :       | (.....)    |
|                    | 1. (.....) |
|                    | 2. (.....) |
|                    | 3. (.....) |
|                    | 4. (.....) |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM : 903078**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRIANA  
Stambuk : 105730408813  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan Judul : "Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2018  
Yang Membuat Pernyataan,

INDRIANA

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.H.Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak. CA**  
NIDN : 0916096601

**Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak**  
NBM : 1073428

## ABSTRAK

INDRIANA, 2018. **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Ansyarif Khalid dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif atau SPSS 16. Data yang diolah adalah hasil kuesioner dari pernyataan pegawai kantor daerah Kabupaten Pangkep. Teknik analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan uji statistik deskriptif melalui aplikasi SPSS 16. Berdasarkan hasil teknik analisis data dengan rumus yang digunakan menghasilkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep sangat berpengaruh dilihat dari tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep.

**Kata Kunci : *Good Governance*, Kinerja Keuangan**

## **ABSTRACT**

INDRIANA, 2018. ***Effect of Good Governance on Financial Performance of Local Government of Pangkajene and Kepulauan Regency***, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Ansyarif Khalid and Advisor II Ismail Badollahi.

*This study aims to determine the effect of Good Governance on Local Government Performance Pangkajene and Kepulauan Islands. The type of research used in this study is quantitative by using descriptive statistical analysis method or SPSS 16. The data is processed is the result of questionnaires from the statement of employees of Pangkep District office. Data analysis techniques using simple linear regression formula and descriptive statistical test through SPSS 16 application. Based on the results of data analysis techniques using the formula used to produce the conclusion that the financial performance of local government of Pangkep district is very influential seen from the level of financial performance of local governments Pangkep district.*

**Keywords: Good Governance, Financial Performance**



## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Maulana B dan Ibu Radiah yang senangtiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senangtiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus selaku pembimbing II yang telah berkenan selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak, CA. Selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada Umumnya.
6. Teman-teman Akuntansi 2\_2013 dan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini dan Semoga bermanfaat bagi kita semua aamiin.

***Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat***

Makassar, 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
a. Tujuan Penelitian.....	7
b. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori .....	8
a. <i>Good Governance</i> .....	8
b. Kinerja Keuangan .....	18
B. Tinjauan Empiris .....	24
C. Kerangka Konsep.....	26
D. Hipotesis .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Definisi Oprasional Variabel dan Pengukuran .....	28
D. Populasi dan Sampel .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
A. Sejarah Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkajene dan Kepulauan .....	34
B. Visi dan Misi BPKD Pangkajene dan Kepulauan .....	34
C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKD Pangkajene dan Kepulauan .....	35
D. Struktur Organisasi BPKD Pangkajene dan Kepulauan.....	36
E. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Pangkajene dan Kepulauan.....	39
B. Penyajian Data .....	49

A. Analisis Statistik Deskriptif .....	49
B. Hasil Pengujian Hipotesis .....	56
C. Analisis dan Interpretasi .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
A. Instrumen Penelitian .....	65
B. Hasil Analisis Statistik .....	69
C. Dokumentasi Penelitian .....	70
D. Surat Keterangan Meneliti dari Tempat/Lokasi Penelitian .....	71
E. Daftar Riwayat Hidup (Biografi Penulis).....	72

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
4.1 Statistik Deskriptif Variabel <i>Good Governance</i> (X).....	49
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan (Y) .....	52
4.3 <i>Descriptive Satatistics</i> .....	54
4.4 <i>Variables Entered/Removed</i> .....	55
4.5 <i>Coefficients</i> .....	55
4.6 Model <i>Summary</i> .....	56
4.7 Uji-F ( <i>Annova</i> ) .....	57
4.8 Regresi Linier Uji-T.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara teoritis, tiga pilar masyarakat (*community*), pasar (*market*) dan negara (*state*) adalah bagian yang harus saling mendukung dan mengawasi. Apabila terjadi ketimpangan antara salah satu tiga pilar tersebut, maka demokrasi dan *fair corporate governance* tidak akan terwujud. Artinya masyarakat memenuhi kewajibannya untuk “taat” kepada negara dengan mematuhi berbagai peraturan dan hukum seperti membayar pajak, retribusi dan lain-lain, demikian halnya negara juga memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat yang salah satu perwujudannya dilihat bagaimana aparat pemerintah melayani masyarakat (INCIS:2005).

Persoalan “saling mengisi” antara ketiga pilar di atas selama ini seringkali bermasalah. Kualitas pelayanan publik oleh pemerintah begitu buruk, sementara partisipasi masyarakat tersumbat. Saluran pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat belum terbuka lebar. Contoh sederhana yang menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan publik dapat dipaparkan sebagai berikut: pengelolaan kegiatan pencatatan penduduk, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), imigrasi dan lain-lain. Pelayanan publik di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu profit dan non-profit. Yang termasuk profit adalah jasa telekomunikasi, air minum, transportasi dan listrik. Termasuk kategori non-profit adalah catatan sipil, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), imigrasi dan KTP.

Pada wilayah pelayanan publik non-profit inilah, aspek pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik relatif kurang, untuk tidak menyebut

absen sama sekali. Pakar *study* kebijakan, Gilbert, menyatakan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam kebijakan, yaitu proses (*process*), hasil produk (*product*) dan kinerja (*performance*). Pada tataran konsepsi secara legal formal, aturan atau perundangan mengenai pelayanan publik non-profit bisa jadi sudah ideal dalam kerangka melayani kepentingan publik. Namun dalam studi kebijakan dikatakan bahwa *product*, dalam hal ini pelayanan publik non-profit, bukanlah menjadi parameter utama dalam menentukan *performance* birokrasi. Disamping *process* pelibatan *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan, kinerja birokrasi pada tataran implementasi memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh *product* dipraktikkan dilapangan.

Seiring dengan lahirnya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Kinerja pegawai pemerintah merupakan isu yang menjadi sorotan publik saat ini, hal ini terlihat karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut agar pemerintah dapat mengelola dan menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Untuk



mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah.

Perbincangan pada dialog publik yang di posting oleh F Daus AR (2016) terkait pelayanan kesehatan di daerah Pangkep juga mengkritisi pelayanan publik yang kurang memuaskan diantaranya respon masyarakat:

“Syahrul Syaf dari pemerhati persoalan publik merespon bahwa, administrasi dianggapnya hal urgen yang harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang melakukan pertolongan pertama pada pasien. Hal ini jelas melupakan sisi kemanusiaan. Ia menawarkan solusi futuristik mengurai sengkabut persoalan administrasi ini menggunakan digitalisasi”.

Organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, akuntabilitas dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah,

sehingga pelayanan masyarakat dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis (Pratiwi:2011).

Dimensi lain penyebab buruknya kinerja keuangan pemerintah secara umum adalah seperti suap-menyuap, Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Kasus fakta yang terjadi dilapangan pada saat mensurvey di daerah pangkep disalah satu desa yaitu Desa Taraweang kepala desanya telah melakukan korupsi senilai 1 Milyar dalam hal ini ada kasus Tanah, pembangunan dan lainnya. Kepala desa telah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengolah dana desa sebagaimana mestinya namun hal yang tidak seharusnya dilakukan itupun terjadi realitanya dilapangan dan akhirnya pada bulan September kepala desanya ditahan oleh polisi akibat kasus korupsi yang dilakukannya.

Pendapat (BPKP 2003) dalam (Sayidah:2007) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan praktek *good governance* telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang salah atau yang menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. Baik buruknya kinerja para aparatur pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun faktor yang dijadikan pertimbangan ada dua faktor yaitu 2 penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan komitmen organisasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa empat faktor *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keadilan dan partisipasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Ningsih dkk:2011).

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi menyebabkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai tata kelola pemerintah yang baik, hal ini disebut dengan istilah *good governance*. Konsep *good governance* ini memiliki pengaruh dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Oleh karena itu respon terhadap *good governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai hal ini. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Kusmayadi, 2009).

Untuk melaksanakan dan membangun prinsip tata kelola pemerintah yang baik tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang lama dan usaha yang terus menerus. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintahan yang baik.

*Good governance* sebagai sistem yang diterapkan pada pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Sistem pemerintahan ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai

permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. (Heriyanto:2015) mengemukakan dalam skripsi (Pertiwi, Siti Hardianti Darma:2017) bahwa *good governance* sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat. Penerapan *Good Governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi.

Dari masalah yang terjadi tersebut, penyimpangan- penyimpangan terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten Pangkep yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang belum maksimal dan pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih harus diperbaiki.

Berdasarkan konsep pemikiran yang tertuang dalam latar belakang, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kerangka acuan bagi pihak pemerintah dalam mengambil keputusan terkait kinerja pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik sehingga masyarakat dapat menerima akses pelayanan yang memuaskan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### a. *Good Governance*

*Good Governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya dan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.

*Good governance* bukanlah suatu isu yang baru bagi dunia usaha di Indonesia. Selepas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, dunia usaha di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya penerapan *good governance* ini. Perkembangan *good public governance* di dunia sejalan dengan perkembangan *new public management* yang mulai diterapkan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik di akhir dekade 1970 atau di awal 1980an, bentuk-bentuk awal prinsip *good public governance* publik juga sudah turut diterapkan. Hal ini karena ide dari *new public management* sebenarnya sama dengan ide *good governance* yaitu bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai manajemen sektor swasta pada manajemen operasional sektor publik agar tujuan dari didirikannya suatu organisasi sektor publik dapat tercapai. (Heyer:2011) dalam jurnal Dwi Susanto,dkk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penerapan program *new public management* adalah melakukan suatu tindakan yang memang ditujukan pengaruh *good governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas layanan publik serta

organisasi layanan publik, dengan mempunyai suatu pandangan atau nilai yang mengedepankan pertanggungjawaban dan perbaikan pemberian layanan publik.

Menurut (Osborne, 2011:6) dalam jurnal Dwi Susanto,dkk membagi inti perhatian *public governance* menjadi lima sudut pandang yang saling berkaitan satu sama lain yang mempengaruhi kualitas layanan publik, yaitu sebagai berikut:

- a) *Socio-Political Governance*, berfokus pada hubungan kelembagaan di dalam masyarakat, dimana pemerintah bukan lagi sebagai pihak yang paling berkuasa atau yang paling menentukan dalam penyusunan kebijakan publik tetapi juga harus memperhatikan pelakupelaku lainnya di masyarakat agar diakui dan dipatuhi oleh semua pihak serta dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan.
- b) *Public Policy Governance*, berfokus pada interaksi diantara para elit politik dan jaringannya dalam menciptakan dan mengatur proses penyusunan kebijakan publik.
- c) *Administrative Governance*, berfokus pada efektifitas dalam pelaksanaan administrasi publik dan penempatan kembali fungsi administrasi publik sehingga dapat meliputi atau mencakup kerumitan permasalahan yang ada pada semua lini atau organisasi pemerintahan.
- d) *Contract Governance*, berfokus pada tatakerja npm khususnya berkaitan dengan hubungan kontrak pengelolaan dalam pemberian layanan publik. Pengaruh good governance terhadap kualitas pemberian layanan publik
- e) *Network Governance*, berfokus pada bagaimana pengorganisasian secara otomatis jaringan-jaringan antar organisasi dapat berfungsi,

dengan peranan atau tanpa peranan pemerintah, dalam pelaksanaan pemberian layanan publik. Usaha lainnya dalam pengidentifikasian *good public governance* adalah yang dilakukan oleh *the international federation of accountants* (IFAC) bekerjasama dengan *the chartered institute of public finance & accountancy* yang pada bulan juni 2013 mengeluarkan draft dengan judul *an international framework of good governance in the public sector*.

Prinsip-prinsip penting *good public governance* yang diperkenalkan melalui draft ini antara lain berupa komitmen yang kuat terhadap integritas, nilai etika dan ketaatan terhadap hukum serta adanya keterbukaan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, draft ini mengidentifikasikan bahwa fungsi utama dari penerapan *good public governance* adalah untuk memastikan bahwa organisasi sektor publik senantiasa bertindak bagi kepentingan masyarakat. *Good public governance* di Indonesia masalah *governance* di sektor publik sudah mendapat perhatian yang cukup mendalam sejak pertengahan dekade 2000. Komite nasional kebijakan *governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/ M.EKON/ II/ Tahun 2004 Tanggal 30 November 2004, mempunyai tugas untuk memperluas cakupan tugas sosialisasi *corporate governance* bukan hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Pada tahun 2008 KNKG berhasil menerbitkan pedoman umum *good public governance* dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan *good public governance* antara lain dalam rangka untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong



timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Selain KNKG, pihak dari luar pemerintahan pun telah melakukan upaya-upaya pengidentifikasian prinsip-prinsip *good public governance*, antara lain yang dilakukan oleh kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan (*The Partnership For Governance Reform*) yang bekerjasama dengan *The Australian Agency For International Development* (AUSAID). Hasil kerja mereka antara lain berupa *Indonesian Governance Index* (IGI) yaitu indeks kualitas penerapan *good governance* pada 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia (gismar et al, 2013).

Pengaruh *good governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik menurut IGI, *governance* adalah suatu proses dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi di antara para eksekutif dan para anggota legislatif serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. *Governance* menurut IGI ini meliputi empat arena, dimana masing-masing arena mempunyai fungsi dan kinerja sendiri-sendiri yang jika disatukan maka secara bersama-sama akan menentukan kualitas *governance* pada setiap provinsi. Keempat arena tersebut meliputi *government*, *bureaucracy*, *civil society* dan *economic society*. *Government*, merupakan lembaga-lembaga yang membuat kebijakan yang terdiri dari lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. *Bureaucracy* adalah lembaga yang melaksanakan kebijakankebijakan yang telah dibuat pemerintah dan pada saat bersamaan juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. *Civil society* meliputi

pihak-pihak diluar pemerintahan, antara lain organisasi nir laba, organisasi sosial, yayasan, serikat buruh, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan penelitian. *Economic society* meliputi entitas usaha dan organisasi-organisasi lainnya yang bertujuan mencari laba atau yang melindungi kepentingan usahanya dengan melakukan perubahan ekonomi dan produksi, maupun yang memberikan advokasi dalam memperbaiki iklim usaha.

Pada masing-masing arena tersebut, IGI akan menilai enam prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

- a. *Participation* (keikutsertaan), yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pada masing-masing arena.
- b. *Fairness* (kewajaran), yaitu suatu kondisi dimana kebijakankebijakan dan program-program diterapkan secara adil kepada setiap orang tanpa memperhatikan status, etnik, agama mauoun gender.
- c. *Accountability* (kebertanggungjawaban), yaitu suatu kondisi dimana para pegawai, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pemerintah pada setiap arena dibebankan tanggung jawab atas setiap tindakannya.
- d. *Transparancy* (keterbukaan), yaitu suatu kondisi dimana keputusan yang diambil oleh para pegawai baik dalam lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga sipil maupun organisasi-organisasi swasta, pada setiap arena, terbuka bagi masyarakat umum untuk diteliti, pengaruh *good governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik dicermati, dan dievaluasi serta suatu kondisi dimana informasi publik tersedia dan mudah diperoleh.

- e. *Efficiency*, yaitu suatu kondisi dimana kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan telah menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan dan juga waktu, secara optimal.
- f. *Effectiveness*, yaitu suatu kondisi dimana kebijakankebijakan dan program-program yang dilakukan telah memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan dan juga waktu, secara optimal. Pada bulan agustus 2013 *the partnerhip* (kemitraan telah menerbitkan *Indonesian Governance Index 2012* (IGI 2012)). Isi dari IGI 2012 ini adalah berupa daftar peringkat kualitas penerapan *good publik governance* pada pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia (gismar et al, 2013).

Munculnya konsep *Good Governance* di Indonesia sebagai reaksi atas perilaku pengelolaan perusahaan yang tidak memperhitungkan stakholder-nya. Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih:2007).

Secara sederhana (Khafid:2008) menyimpulkan *Governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,

proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat tidak ada yang dominan menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi negara.

*Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada;

- a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

- b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dalam (Siregar, Muhammad Arifin:2008), tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan Pasal 2 (d) mengartikan “Kepemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, 4 pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa *good governance* merupakan tata kelola pemerintah yang baik yang mengatur pemerintahan dan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, ekonomi dan politik yang dilakukan dengan mematuhi prinsip *good governance* dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

*Asian Development Bank* menegaskan adanya konsensus umum bahwa *Good Governance* dilandasi oleh 4 (empat) pilar, yaitu : *accountability, transparency, participation, effectiveness and efficiency*. Dari berbagai pendapat mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik *Good Governance* tersebut diatas, ternyata jumlah komponen prinsip-prinsip *Good Governance* sangat bervariasi. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut tidaklah berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan yang erat,

sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya. Berikut merupakan prinsip *good governance*:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Contohnya melalui forum musyawarah. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

#### 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut Mardiasmo (2009:18) ,“Akuntabilitas adalah pertanggung-jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan”. Sedangkan menurut

Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas kinerja program atau kegiatan yang telah dilakukan.

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organisasi sehingga pengelolaan pemerintah terlaksana secara efektif. Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban *public* terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Secara teoritis akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertical dan horizontal.

- a. Akuntabilitas vertical adalah menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya
- b. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban pemegang jabatan publik pada lembaga yang setara, seperti gubernur dengan DPRD tingkat 1

### 3. Partisipasi (*responsibility*)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat). Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan

lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

#### 4. Keadilan (*independency*)

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan asas *consensus*, transparansi dan *responsive*, *good governance* juga harus didukung dengan asas *equity*, yakni kesamaan dalam perlakuan (*Treatmeant*) dan pelayanan. Asas ini dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia tergolong bangsa yang plural, baik dilihat dari segi etnik, agama, dan budaya. Dan sebagai bangsa yang beradab dan terus berupaya menuju cita *good governance* maka proses pengelolaan pemerintahan harus memberikan peluang, pelayanan dan *treatmeant* yang sama dalam koridor keadilan dan kejujuran, tanpa mengurangi hak hak individu maupun masyarakat. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

#### **b. Kinerja (*Performance*)**

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Menurut Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara



kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah terjemahan dari *performance* yang berarti penampilan atau unjuk kerja atau prestasi. Istilah kinerja dalam Kamus *Illustrated Oxford Dictionary* (dalam Nasution, 2010:141) adalah menunjukkan *the execution of fulfilment of a duty* (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas) atau *persons achievement under test conditions* (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji). Kinerja mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang karyawan selama periode tertentu. Jika karyawan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik maka perusahaan akan mengalami kegagalan.

Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Mahsun (2006:4) dalam Auditya, Lucy dkk (2013) menyatakan bahwa Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Sedangkang menurut Bastian (2010:274) dalam Auditya, Lucy dkk (2013), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan: Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam MenPAN (2007) menyatakan: Kinerja Instansi Pemerintah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Arsyiaty, dkk (2008) dalam Usman dan Lukman (2014), Kinerja instansi merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu kegiatan dalam sebuah instansi pemerintah sehubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan kuantitas dan kualitas terukur dengan menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas. Dari beberapa pengertian di atas, kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja.

Menurut Mahsun (2006:4) mengatakan bahwa kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pegawai pemerintah di Indonesia, banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan, menyebabkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Untuk mengembalikan dan bisa memulihkan kepercayaan masyarakat, tentunya diperlukan perubahan di segala bidang, yang tentunya bisa memperbaiki kualitas kinerja pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (PerPres Nomor 29 Tahun 2014).

Akuntabilitas kinerja diperlukan sebagai pertanggung jawaban terhadap kinerja. Hasil kerja dari pegawai pemerintah dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas dari masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas diperlukan oleh pemerintah, karena berdasarkan informasi tersebut menjadi bahan pengambilan keputusan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri jabatan Kepala Pemerintah.

Selanjutnya menurut Mahsun (2006) dalam bukunya yang berjudul "Pengukuran Kinerja Sektor Publik" mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja karyawan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan demi kelangsungan hidup organisasi suatu perusahaan. Dalam mencapai suatu kinerja yang tinggi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi kinerja karyawan terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan karakteristik kelompok kerja. Sedangkan faktor eksternal antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, keinginan pelanggan,

pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar.

b. Penilaian Kinerja

Karyawan Sofyandi (2008:122) menyatakan bahwa penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Menurut Bangun (2012) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai karyawan dengan standar pekerjaan. Dalam penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja karyawan memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja serta memotivasi karyawan pada waktu berikutnya. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskannya.

c. Kinerja Keuangan dan Non keuangan

a. Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh

perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Keuangan Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis.

b. Kinerja Non Keuangan

Kinerja non keuangan adalah kinerja yang menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan. Perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan perusahaannya dengan menggunakan analisis kinerja non keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja non keuangan dalam perusahaan dan hal ini berkaitan dengan pentingnya informasi mengenai kinerja non keuangan yang semakin dibutuhkan. Kinerja non keuangan perusahaan dapat dilihat melalui analisis kinerja karyawan melalui prestasi kerja, kualitas produk, perkembangan perusahaan, serta lingkungan kerja (Amelia,dkk:2014).

Ukuran kinerja non financial merupakan respons terhadap masalah-masalah tersebut dengan cara menggunakan data fisik sederhana dan bukannya data akuntansi yang telah dialokasikan tidak

terhubung dengan sistem akuntansi keuangan umum, dipilih untuk mengukur satu aspek spesifik dari kinerja dan bukan menjadi segalanya untuk semua tujuan, atau mengkombinasikan faktor–faktor tersebut. Kinerja–kinerja yang diukur dalam sistem non keuangan yaitu :

1. Kehadiran Pegawai
2. Prestasi Kerja
3. Kualitas Produk
4. Perkembangan Perusahaan
5. Lingkungan Kerja

## **B. Tinjauan Empiris**

Handi Yuniar Lestiawan & Bambang Jatmiko (2016) tentang “*Key Success Factor Good Government Governance* serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (*Survey* pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)” kesimpulan dari penelitian adalah bahwasanya penerapan prinsip *good governance* di pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih terbilang kurang, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Terlihat bahwa pemda yang masih enggan mempublikasikan laporan keuangan pada situs pemda maupun media massa, pemda masih enggan mempublikasikan rencana atau target program kerja kepada masyarakat, pemda masih enggan mempublikasikan LAKIP, serta pemda juga masih tidak setuju atas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan / peraturan daerah.

Wala Siti Nurlaela (2015) tentang Pengaruh *Good Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (*Survei* pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis) Pelaksanaan *good governance* di dinas

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip- prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan dengan cukup baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

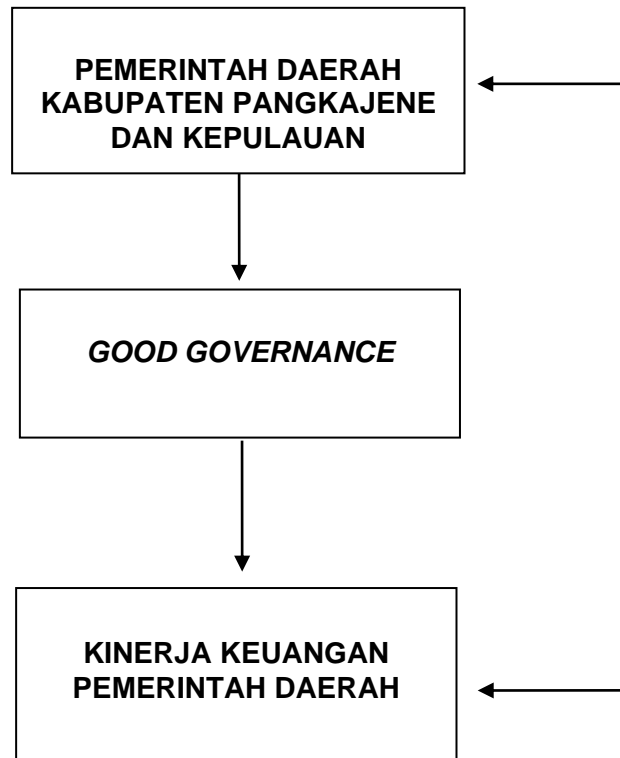
Dwi Susanto, Dian Anggraeni Yusuf dan Yunaita Rachmawati (2015) Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik Adanya pengaruh positif dari penerapan *Good Governance* terhadap kualitas pemberian layanan publik.

Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) tentang Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan *Good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

Siti Aisyah, Karmizi, dan Enni Savitri (2014) Pengaruh *Good Governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten kampar) *Good governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten kampar.

Abdul Hamid, Mukhlis Yunus, dan Sulaiman (2015) Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bireuen Prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian) mempengaruhi kinerja pegawai, dan kinerja dinas pertanian dan peternakan kabupaten bireuen.

### C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1

### KERANGKA PEMIKIRAN

### D. Hipotesis

Adapun dugaan sementara penelitian ini yaitu penulis mencoba menyatakan *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif data didapatkan pada data yang telah diperoleh, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh gambaran sebenarnya. Dimana penulis mengamati pengaruh *Good Governance* terhadap kinerja keuangan di instansi pemerintah kabupaten Pangkep. Dalam *applied research*, dilaksanakan dalam praktek, yaitu:

- 1) Deskriptif, bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu.
- 2) Eksplanatori, bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berpusat pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pangkajene dan kepulauan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 (Poros Pangkep) Waktu pelaksanaan penelitian mulai 16 November 2017 sampai dengan 16 Januari 2018 dengan meneliti tentang pengaruh *good governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

### C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *good governance* (X) sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah (Y). Berikut dijelaskan definisi dan operasionalisasi variabel yaitu:

1. *Good governance*, adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya dan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip *Good Governance* yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yaitu:
  - a. *Transparansi (Transparency)* merupakan Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
  - b. *Akuntabilitas* adalah pertanggung-jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
  - c. *Partisipasi* adalah Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat).
  - d. *Keadilan* adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kinerja keuangan, menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan yaitu usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangkep. Sampel penelitian terdiri atas 2 yaitu BPKD dan Dispenda terdiri dari 30 responden, yaitu:

- Kepala Badan BPKD : 1 orang
- Sekretaris BPKD : 1 orang
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin BPKD : 1 orang
- Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan BPKD : 1 orang
- Kepala Bagian Keuangan BPKD : 1 orang
- Kepala Bidang Anggaran BPKD : 1 orang
- Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD : 1 orang
- Kepala Bidang Akuntansi BPKD : 1 orang
  - Staff pegawai : 3 orang
- Kepala Aset Daerah BPKD : 1 orang
- Bagian Dispenda 18 orang kepala bidang dan pegawai staff

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dikelompokkan atas dasar data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diolah dan diperoleh atau didapat secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini di Instansi pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan kepulauan khususnya pada kantor BPKD. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengaruh *Good Governance* pada instansi bagi peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang peroleh secara langsung dan sudah diolah yang bersumber dari Instansi yang telah diteliti dan terdokumentasi, antara lain berupa struktur organisasi instansi, sejarah, dan kegiatan instansi serta kebijakan-kebijakan instansi dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini instansi pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Adapun Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup. Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrument yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data

yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu :

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju
3. KS : Kurang Setuju
4. TS : Tidak Setuju
5. STS: Sangat Tidak Setuju

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut :

1. SS : 5
2. S : 4
3. KS : 3
4. TS : 2
5. STS : 1

#### **F. Teknik Analisis**

Adapun alat analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Statistik Deskriptif menggunakan SPSS

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini yang dikemukakan dalam bentuk laporan adalah cara-cara penyajian data melalui tabel maupun distribusi frekuensi. Setelah itu disajikan dalam bentuk berbagai diagram, seperti: grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, dan histogram. Ataupun penjelasan kelompok dari distribusi frekuensi dengan mencari dan menghitung mean, median, modus, standar deviasi. Pehitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kecenderungan data.

## 2. Regresi Linier Sederhana

Salah satu alat yang digunakan dalam memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Tujuan dari metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*).

Rumus regresi linear sederhana:

$$Y = a + b.X$$

Di mana:

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a dan b = konstanta

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### a. Sejarah Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkajene dan Kepulauan

Dalam rangka perkembangan zaman dan meningkatkan pembangunan yang digalakkan dan dilaksanakan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah Satuan Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dokumentasi dan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbentuk pada tahun 2008, penggabungan antara bagian keuangan dengan dinas pendapatan daerah Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah *Kabupaten dan Kepulauan Pangkajene dan Kepulauan*. Adapun yang menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Tahun 2012 sampai sekarang, adalah Dra.Hj.JUMLIATI, M.Si.

**b. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

**a. Visi**

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah "Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter Menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri pada Tahun 2021" hal itu untuk mengaktualisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2015-2019 yang mengedepankan paradigma maju, mandiri dan religius.

**b. Misi**

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang profesional.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.
3. Mewujudkan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

**a) Nilai**

Nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah "JITU" (1) Jujur sebagai simbol dari akuntabel dan transparan; (2) Ikhlas sebagai simbol dari Proporsional, professional, harmonis demi kesejahteraan semua pihak; (3) Teratur sebagai simbol dari Pelaksanaan



Sistem dan Prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum;

(4) Ulet sebagai simbol dari rutinitas yang berkesinambungan dan progresif.

**c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkajene dan Kepulauan**

**a) Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: *"Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"* Seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak punya niat menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN, namun bila di sana sini masih terdapat kesalahan itu semata-mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cepatnya perubahan peraturan, jadi wajar bila learning by doing. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategis untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari:

1. Meningkatkan sistem akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggung-Jawaban SKPD yang akuntable dan profesional;

2. Terwujudnya aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penyebarluasan Informasi kepada publik tentang Pengelolaan Keuangan yang mandiri.

**b) Sasaran**

Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan serta aset daerah maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Menyiapkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan.
3. Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta pengkajian, pengelolaan dan pengadministrasian dana perimbangan.
4. Penyerapan belanja yang optimal.

**d. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkajene dan Kepulauan**

Organisasi untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

sebelumnya bernama Dinas Pengelola Keuangan Daerah, kemudian berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan ibu Dra. Hj. Jumliati, M. Si dari bulan April tahun 2011 hingga sekarang. Sekretariat dipimpin oleh ibu Risnawaty.S, SE, M.Si. serta pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh *Hasnaniah, SE*; Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh: Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki 4 (empat) Bidang diantaranya sebagai berikut: 1). Bidang Anggaran dipimpin oleh Iman Takbir, SSTP, MM; 2). Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Hj. Ariyani Talib, S.Sos.; 3). Bidang Akuntansi dipimpin oleh ASRI, S.Sos, M.Si. 4). Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Endang Sri Wahyuni, S. Kom.

### **SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 38 A**

**(1)** Untuk Pelaksanaan tugas dan Fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari ;

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran;
  1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
  2. Sub Bidang Otorisasi DPA-SPKD;

3. Sub Bidang Pembiayaan Daerah.
- d. Bidang Perbendaharaan;
    1. Sub Bidang Pengujian Pendapatan dan Belanja;
    2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan;
    3. Sub Bidang Administrasi Gaji.
  - e. Bidang Akuntansi;
    1. Sub Bidang Pembukuan;
    2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
    3. Sub Bidang Neraca Daerah
  - f. Bidang Aset Daerah;
    1. Sub Bidang Investasi Aset Daerah;
    2. Sub Bidang Bidang Perencanaan Aset Daerah;
    3. Sub Bidang Pelaporan dan Penghapusan Aset.
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran;
  1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
  2. Sub Bidang Otorisasi DPA-SPKD;

3. Sub Bidang Pembiayaan Daerah.
- d. Bidang Perbendaharaan;
    1. Sub Bidang Pengujian Pendapatan dan Belanja;
    2. Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan;
    3. Sub Bidang Administrasi Gaji.
  - e. Bidang Akuntansi;
    1. Sub Bidang Pembukuan;
    2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
    3. Sub Bidang Neraca Daerah
  - f. Bidang Aset Daerah;
    1. Sub Bidang Investasi Aset Daerah;
    2. Sub Bidang Bidang Perencanaan Aset Daerah;
    3. Sub Bidang Pelaporan dan Penghapusan Aset.
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkajene dan Kepulauan**

**Pasal 36 A**

Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) angka 8 selain sebagai Perangkat Daerah juga adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dokonstrasi dan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 37 A**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 A Peraturan Daerah ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset daerah ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 3**

**(1)** Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang Mempunyai Tugas melaksanakan sebagian Kewenangan / urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

**(2)** Untuk menyelenggarakan Tugas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugas Kewenangannya;
- d. Pengelolaan Administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan;
- e. Pelaksanaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

### **SEKRETARIS**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Perencanaan, dan Pelaporan dalam lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sekretaris mempunyai Fungsi;
  - a. Pengordinasian, Sinkronisasi dan integrasi Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
  - b. Pengordinasian Perencanaan dan Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku SKPD dan SKPKD;

- d. Pengordinasian kerja sama Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan instansi terkait;
- e. Pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, dan pelaporan dan rumah tangga badan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan Bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 5**

Sekretariat terdiri dari ;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Urusan, Ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan asset, kepegawaian, dan tugas umum lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas Melaksanakan dan Mengumpulkan Bahan, Mengolah Data dalam rangka Penyusunan Program dan Kegiatan serta Pelaporan.



- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas melaksanakan, Mengatur, Mengawasi dan Mengendalikan pelaksanaan tugas–tugas di Bidang Administrasi Keuangan Meliputi Penyusunan Anggaran, verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.

### **BIDANG ANGGARAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyiapkan Perumusan dan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang di maksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi ;
- a. Menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang urusan Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengordinasian Perencanaan Anggaran penanganan urusan Pemerintahan Daerah;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan RKA/SKPD dan RKA/SKPKD bidang belanja.
  - d. Penyusunan Peraturan Daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan;
  - e. Penyusunan Peraturan Bupati tentang penjabaran RAPBD dan penjabaran RAPBD perubahan;
  - f. Penyiapan bahan Penetapan dan Pelaksanaan otorisasi DPA-SKPD

- g. Penyiapan bahan Penetapan dan Pelaksanaan standar satuan harga dan analisis Standar Belanja Daerah
- h. Penyiapan Anggaran kas dan SPD SKPD dan SKPKD
- i. Penyusunan pedoman penetapan dan evaluasi APB Desa;
- j. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan perencanaan anggaran belanja;
- k. Penyusunan pedoman kebijakan pembiayaan dan investasi daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang di berikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 8**

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD ;
- b. Sub Bidang Otorisasi DPA-SKPD:

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tugas Menyiapkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD Bidang Belanja, Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah RAPBD dan RAPBD Perubahan, menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Bupati Penjabaran RAPBD dan RAPBD Perubahan, menyiapkan Standar Satuan Harga dan Analisis standar belanja, menyiapkan bahan pedoman penyusunan APB desa, melakukan verifikasi dan evaluasi RKA-SKPD dan RKA-SKPKD.
- (2) Sub Bidang Otorisasi DPA\_SKPD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan otorisasi DPA-SKPD dan SKPKD,

meliputi penelitian dan verifikasi DPA, menghimpun dan memfasilitasi penetapan dan evaluasi DPA, serta penyiapan Anggaran kas dan SPD.

### **BIDANG PERBENDAHARAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan Perumusan dan Penetapan Kebijakan bahan pedoman Pengelolaan Perbendaharaan daerah serta meneliti dan melakukan pengujian terhadap SPP dan SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan pedoman pelaksanaan perbendaharaan ;
  - b. Pelaksanaan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan pengajuan SPP dan SPM ;
  - c. Pengelolaan Penerbitan SPM;
  - d. Pelaksanaan Pengelolaan Gaji ;
  - e. Pelaksanaan Penatausahaan BUD ;
  - f. Pelaksanaan Pengelolaan Pembiayaan dan investasi daerah ;
  - g. Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis bendahara pengeluaran;
  - h. Pelaksanaan tugas–tugas lain sesuai dengan kewenangan dan Bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 11**

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengujian Pendapatan dan Belanja ;

- b. Sub Bidang pengelolaan dan Penatausahaan ;

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pengujian Pendapatan dan Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengajuan SPP dan SPM.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan atas penerimaan, penempatan dan pengeluaran uang pemerintah daerah / kas daerah serta pembiayaan daerah.

### **BIDANG AKUNTANSI**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Akuntansi dipimpin Oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas menyiapkan bahan perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, melaksanakan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepala

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pertanggung jawaban APBD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan daerah;
- c. Penyusunan informasi keuangan daerah;
- d. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Pelaksanaan Sistem Akuntansi *Pemerintahan Daerah*;
- f. Meneliti laporan fungsional SKPD dan SKPKD;
- g. Melakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja, dan asset daerah;
- h. Pelaksanaan bimbingan, supervise, konsultasi, dan evaluasi bidang pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan.

### **BIDANG ASET DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang asset daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan asset daerah, melaksanakan kebijakan, menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan analisa, menginventarisasi dan mendata seluruh asset daerah, melaksanakan penghapusan asset, serta melaksanakan evaluasi di bidang asset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat
  - 1. Kepala bidang asset daerah mempunyai fungsi:
    - a. menyiapkan bahan perumusan dan penetapan di bidang urusan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - b. penyelenggaraan penetapan kebutuhan dan pengembangan asset daerah;
    - c. perencanaan kebutuhan dan pengadaan asset daerah sesuai kebutuhan yang berlaku;
    - d. pengordinasikan dan fasilitas pengadaan asset daerah;

- e. pembinaan, pengawasan, monitoring terhadap pemanfaatan asset daerah;
- f. pelaksanaan analisa, penilaian dan perhitungan biaya dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan informasi asset daerah;
- h. penyiapan dokumen pelaksanaan penghapusan asset daerah;
- i. penyelenggaraan pelaporan mengenai asset daerah;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang di berikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 11**

Bidang Aset daerah terdiri dari:

- a. Sub.Bidang perencanaan asset daerah;
- b. Sub.Bidang inventarisasi dan pengamanan asset daerah;
- c. Sub.Bidang penghapusan dan pelaporan asset daerah;

#### **Pasal 12**

- (1) Sub. bidang perencanaan asset daerah dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas melaksanakan analisa, mengkaji, menilai, meneliti, menghitung biaya, dan membuat pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah, serta evaluasi kegiatan.
- (2) Sub. Bidang inventarisasi dan pengamanan asset daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang asset daerah di bidang penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan asset daerah, menyusun rencana

kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah, penganggaran pengadaan, pendistribusian, melaksanakan pendataan dan inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan serta evaluasi kegiatan.

- (3) Sub. Bidang penghapusan dan pelaporan asset daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas sebagaimana tugas kepala bidang asset daerah di bidang pelaksanaan analisa, pangkajian, penilaian, pelaksanaan penelitian, perhitungan biaya, penyusutan, membuat pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan neraca, menyiapkan data, menyusun laporan barang milik daerah (LBMD), menyusun bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang penghapusan asset dari daftar kuasa pengguna, dan daftar barang/ asset milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan pencatatan pelaporan, serta evaluasi kegiatan.

## **Pasal 15**

- 1) Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pencatatan, pembukuan penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan atas pelaksanaan APBD berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyusun laporan keuangan daerah dan menyusun Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **B. Penyajian Data**

### **a. Analisis Statistik Deskriptif**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 30 responden dari dua sampel yaitu bagian BPKD dan Dispenda.

### 1. *Good Governance* (X)

*Good governance* ini merupakan tata kelola pemerintahan yang baik didalamnya mencakup item-item diantaranya akuntabilitas, transparansi, keadilan, partisipasi.

Berikut tabel 4.1 yang menyajikan deskripsi jawaban responden dalam kuesioner:

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif Variabel *Good Governance* (X)**

<b>Pernyataan</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Pernyataan 1	30	4	5	4.56	0.52
Pernyataan 2	30	3	5	4.11	0.6
Pernyataan 3	30	3	5	4	0.5
Pernyataan 4	30	3	5	4.22	0.78
Pernyataan 5	30	3	5	3.89	0.78
Pernyataan 6	30	3	5	4.22	0.67
Pernyataan 7	30	3	5	4.11	0.6

Berdasarkan tabel dapat dideskripsikan 7 jawaban responden sebagai berikut:

- 1) Terhadap pernyataan jawaban pertama, berkaitan dengan adanya publikasi laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin. Rata-rata jawaban responden adalah 4,56. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu bertanggungjawab dengan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara rutin. Nilai standar deviasi sebesar 0,52 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.



- 2) Terhadap pernyataan jawaban kedua, berkaitan dengan adanya akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Rata-rata jawaban responden adalah 4,11. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu secara transparansi dalam mengakses informasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,6 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
- 3) Terhadap pernyataan jawaban ketiga, berkaitan dengan adanya hak pegawai diberikan secara proporsional. Rata-rata jawaban responden adalah 4. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menerapkan prinsip *good governance* dengan prinsip keadilan. Nilai standar deviasi sebesar 0,5 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
- 4) Terhadap pernyataan jawaban keempat, berkaitan dengan adanya sistem hukum atau peraturan yang jelas dan penegakannya kepada semua pihak. Rata-rata jawaban responden adalah 4,22. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu menerapkan prinsip *good governance* dengan prinsip keadilan. Nilai standar deviasi sebesar 0,78 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
- 5) Terhadap pernyataan jawaban kelima, berkaitan dengan terdapat sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggung jawaban instansi. Rata-rata jawaban responden adalah 3,89. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan mampu bertanggungjawab dengan adanya sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggung jawaban instansi. Nilai standar deviasi sebesar 0,78 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

- 6) Terhadap pernyataan jawaban keenam, berkaitan dengan mematuhi peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,22. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu berpartisipasi dalam penegakan hukum dan menjalankan tugas dan fungsi. Nilai standar deviasi sebesar 0,67 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
- 7) Terhadap pernyataan jawaban ketujuh, berkaitan dengan penyampaian informasi bersifat cepat, utuh dan tepat waktu. Rata-rata jawaban responden adalah 4,11. Ini menyatakan bahwa pejabat pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mampu secara transparansi untuk menyampaikan informasi secara cepat, utuh, dan tepat waktu. Nilai standar deviasi sebesar 0,6 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

## **2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Y)**

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah pada kinerja keuangan dimanakerja keuangan dinilai dari aspek non finansial yaitu melalui kinerja

manajerial pemerintahan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut tabel 4.2 yang memberikan deskripsi mengenai jawaban responden terhadap kuesioner kinerja keuangan.

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan (Y)**

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std Deviation
Pernyataan 1	30	4	5	4.33	0.5
Pernyataan 2	30	3	5	4.11	0.6
Pernyataan 3	30	3	5	4.33	0.70
Pernyataan 4	30	3	5	4.22	0.67
Pernyataan 5	30	3	5	4.33	0.70
Pernyataan 6	30	2	5	4	0.97
Pernyataan 7	30	4	5	4.33	0.5
Pernyataan 8	30	2	5	4	1

2. pernyataan pertama menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas perencanaan. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal perencanaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,5 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
3. pernyataan kedua menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas investigasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,11. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal investigasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,6 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

4. pernyataan ketiga menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas koordinasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal koordinasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,70 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
5. pernyataan pertama menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas evaluasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4,22. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal evaluasi. Nilai standar deviasi sebesar 0,67 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
6. pernyataan kelima menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas pengawasan. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal perencanaan. Nilai standar deviasi sebesar 0,70 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
7. pernyataan keenam menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas pemilihan staff. Rata-rata jawaban responden adalah 4. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal

pemilihan staff. Nilai standar deviasi sebesar 0,97 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

8. pernyataan ketujuh menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas perwakilan. Rata-rata jawaban responden adalah 4,33. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal perwakilan. Nilai standar deviasi sebesar 0,5 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.
9. pernyataan kedelapan menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam melakukan tugas negoisasi. Rata-rata jawaban responden adalah 4. Nilai ini menunjukkan bahwa responden memiliki kinerja tinggi dalam hal negoisasi. Nilai standar deviasi sebesar 1 menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang bersifat ekstrim dan tidak *outliner*. Dikatakan *outliner* apabila data tersebut lebih besar dari 2,5 standar deviasi.

**Tabel 4.3**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	30	24.00	35.00	29.9667	3.02271
Kinerja Keuangan	30	27.00	40.00	33.4667	3.82130
Valid N (listwise)	30				

Hasil olah data SPSS 16

## b. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dengan regresi ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis regresi adalah metode enter.

**Tabel 4.4**  
**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Good Governance <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Tabel 4.5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.515	5.241		1.434	.163
	Good Governance	.866	.174	.685	4.976	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.5 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7.515 + 866X + e$$

- a. konstanta sebesar 7.515 menyatakan bahwa jika tidak ada *good governance*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan akan sebesar 7.515

- b. koefisien  $X = 866$ , menunjukkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Hal ini berarti bahwa jika *good governance* ditingkatkan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.
- c. standar *error* (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu

**a) Hasil Pengukuran *Adjusted R*<sup>2</sup>**

*adjusted R*<sup>2</sup> pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel, dalam hal ini *adjusted* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan *good governance* (X) dalam kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan (Y). “*adjusted* dianggap lebih baik dan  $R^2$  karena nilai *adjusted R*<sup>2</sup> dapat naik ataupun turun apabila ada suatu variabel independen ditambahkan dalam model” (Ghazali,2005) dalam skripsinya Putri Lubis, 2010.

**Tabel 4.6**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.450	2.83312

a. Predictors: (Constant), Good Governance

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,450 yang berarti bahwa variabel dependen (kinerja keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel independent (*good governance*) yang dimana apabila nilai *adjust R*<sup>2</sup> dimulai dalam jumlah presentase adalah sebesar 4,50%.

### b). Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah pemberlakuan good governance (X) berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan (Y) Bila nilai  $F > 4$ , maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 0,05 (5%), artinya hipotesis yang diterima adalah bahwa variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.723	1	198.723	24.758	.000 <sup>a</sup>
	Residual	224.744	28	8.027		
	Total	423.467	29			

a. Predictors: (Constant), Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari uji ANNOVA (*Analysis Of Variance*) atau uji-F, maka didapat F hitung sebesar 24.758 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Oleh karena itu, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah. Dengan begitu *good governance* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

### c). Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-T)

Uji-t dilakukan untuk menguji secara persial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep dan kepulauan (Y). Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:



**Tabel 4.8**  
**Regresi Linear**  
**Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.515	5.241		1.434	.163
Good Governance	.866	.174	.685	4.976	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari hasil Uji-t dapat diketahui bahwa variabel yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pangkajene dan kepulauan adalah variabel dengan signifikan  $<0,05$ . Pada tabel 5.8 menunjukkan nilai signifikan masing-masing variabel. Nilai sig *good governance* = 0,000 ( $<0,005$ ) berarti secara parsial, semakin tinggi *good governance* maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.

### C. Analisis dan Interpretasi

Hasil penelitian ini secara parsial sejalan dengan penelitian Ira Amelia, Desmiyawati, Nur Azlina yang menyatakan bahwa *Good governa* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

Penelitian ini secara parsial sejalan dengan penelitian Wala Siti Nurlaela (2015) yang menyatakan bahwa *good governance* di dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan dengan cukup baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sampel yang diambil ada 2 yaitu bagian BPKD dan Dispenda yang terdiri atas kepala badan dan sekretaris BPKD, kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin, kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, kepala Bagian Keuangan, kepala Bidang Anggaran, kepala Bidang Perbendaharaan, kepala Bidang Akuntansi dan staff, kepala Aset Daerah. Serta bagian Dispenda 20 orang kepala bidang dan staff.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode statistik uji-F, uji-t dan *adjusted R Square* dalam aplikasi program SPSS analisis regresi linier. Penelitian ini tidak menggunakan uji multikolinearitas karena variabel yang digunakan hanya terdiri dari dua variabel menggunakan satu variabel independen (*good governance*) dan variabel dependen (kinerja keuangan). Yang dimana kedua variabel bebas diantaranya. Hasil pengujian yang ditentukan diungkapkan dibawah ini.

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini mampu memberikan secara simultan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Dengan ditemukan  $H_a$  diterima.

Apabila diuji secara parsial maka, didapatkan bahwa good governance berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi mungkin karena hak pegawai diberikan secara proporsional. Angka R Square atau adjusted R dari hasil penelitian ini adalah sebesar 0,450 yang berarti bahwa variabel dependen (kinerja keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel independent (pemberlakuan good governance) yang dimana apabila nilai adjust R<sup>2</sup> dimulai dalam jumlah presentase adalah sebesar 4,50%.

## B. Saran

Jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit sehingga tingkat keseluruhan dari penelitian ini cukup rendah, karena menggunakan kuesioner ada kemungkinan respon bias dari responden karena tidak serius dalam memberikan jawaban maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya menambah jumlah sampel yang diteliti dengan demikian diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat, Menambah variabel independen, dependen, *moderating*, *intervening* yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja keuangan, Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk menghindari respon bias akibat penggunaan kuesioner atau menggunakan metode eksperimen sebagai pengganti metode kuesioner.

Hasil dari penelitian ini juga mampu memberikan kontribusi lebih kepada pengembangan metode penerapan *good governance*. Juga dapat melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Mukhlis Yunus, dan Sulaiman (2015) Pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja pegawai dan dampaknya terhadap kinerja dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Bireuen. Jurnal Vol.4 No.4
- Amelia Adinda Nancy Supit,dkk. (2014) ISSN 2303-1174 Analisis Kinerja Non Keuangan PT. Otsuka Indonesia Cabang Manado. Jurnal. Vol.2 No.2 Juni 2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado
- Dwi Susanto, dkk (2015) Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. Jurnal paradigma vol.12 no.02
- Dwi Susanto, dkk. Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. ISSN : 1693-0827 Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015 Hal. 75
- F Daus AR (2016) Dialog Publik, Dinas Kesehatan Pangkep, Pansus Kesehatan DPRD, Pelayanan Kesehatan, Puskesmas, RSUD Pangkep
- F. Ekhomawaty (2012) BAB III Metode Penelitian. [eprints.walisongo.ac.id/742/4/082411097\\_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/742/4/082411097_Bab3.pdf). internet. dikutip pada 13 agustus 2017 pukul 23.22 Wita
- Garnita, Nita (2008) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi
- Handi Yuniar Lestiawan & Bambang Jatmiko (2016) *Key Success Factor Good Government Governance* serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul) jurnal Vol. 5 No.1.
- Indonesian Institute For Civil Society (INCIS)* (2005) Defisit pelayanan publik: survei persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di DKI Jakarta
- Intihanah dan Nur Afifa Muthia S. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Good Governance terhadap kinerja Pemerintah daerah (studi pada dinas kesehatan kota Kendari). Jurnal akuntansi dan keuangan fakultas ekonomi dan bisnis UHO
- Ira Amelia, Desmiyawati, Nur Azlina. Pengaruh good governance, pengendalian intern, dan budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja pemerintah kabupaten pelalawan) jurnal.
- Khafid, (2008) Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Kaitannya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
- Kountur, Ronny (2005) Statistik Praktis. Jakarta: PPM

- Kusmayadi, Dedi (2009) Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Government Governance*. Jurnal Ichsan Gorontalo Vol.4 No.2
- Mahsun (2006) Dalam Auditya, Lucy dkk (2013) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Vol.3 No.1
- Muh. Subhan (2016) [Http://Www.Makassarterkini.Com/Berita/3403/-Kinerja-Skpd-Pangkep-Jauh-Dari-Target](http://www.makassarterkini.com/Berita/3403/-Kinerja-Skpd-Pangkep-Jauh-Dari-Target)
- Nining Ade Ningsih, Indar, dan Amran Razak. Analisis Hubungan Prinsip-prinsip *Good Governance* dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Jurnal
- Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. Jurnal akuntansi universitas jember vol.12 no.02
- Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pertiwi, Siti Hardianti Darma (2017) Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Skripsi. Makassar: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Siregar, Muhammad Arifin (2008) Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Tesis
- Siti Aisyah, Karmizi, dan Enni Savitri (2014) Pengaruh *Good Governance*, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten kampar). JOM FEKON Vol.1 No.2
- Soemantri Yusuf, Dedy (2009) Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung
- Sugiyono (2009) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafitri, Nurul (2016) Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Akuisisi dan Merger pada PT. XI Axiata, Tbk. Jakarta. Skripsi

- Tri Endar Susianto dan Suyatno. Bukti Empiris Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Kinerja Koperasi di Sukabumi. Jurnal riset akuntansi dan perpajakan vol.1 no.2.
- Trisnaningsih, Sri (2007) Indenpendensi Auditor dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman *Good Corporate Governance*, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. Jawa Timur: Simposium Nasional Akuntansi X
- Wala Siti Nurlaela (2015) Pengaruh *Good Governance* dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis) jurnal

## LAMPIRAN

### A. Instrumen Penelitian

#### Kuesioner penelitian

#### **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Data dan informasi yang bapak/ibu berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena itu partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner ini sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya jamin kerahasiaan dan semata-mata digunakan untuk melengkapi penelitian saya.

Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,

Indriana

I. Petunjuk Pengisian

1. Lengkapilah identitas diri anda pada bagian awal kuesioner ini
2. Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dengan memberi tanda *checklist* (√) untuk setiap pernyataan berisi satu jawaban dan jangan sampai ada yang terlewatkan.
3. Pilihlah jawaban untuk pertanyaan  
SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
KS : Kurang Setuju  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

II. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan
2. Usia :  dibawah 20 tahun  
 20-30 tahun  
 31-40 tahun  
 41-50 tahun  
 Diatas 50 tahun
3. Pendidikan :  SMA  
 Diploma  
 Strata 1 (S-1)  
 Diatas starata 1 (S-2)
4. Lama Bekerja :  kurang dari 1 tahun  
 Antara 1-5 tahun  
 Lebih dari 5 tahun



Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(KS) Kurang Setuju	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

**GOOD GOVERNANCE (Variabel X)**

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	KS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Publikasi laporan keuangan tahunan dilakukan secara rutin					
2. Adanya akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu					
3. Hak pegawai diberikan secara proporsional.					
4. Adanya sistem hukum atau peraturan yang jelas dan penegakannya kepada semua pihak.					
5. Terdapat sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggung jawaban instansi.					
6. Mematuhi pertauran, ketentuan serta hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi.					
7. Penyampaian informasi bersifat cepat, utuh dan tepat waktu.					

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(KS) Kurang Setuju	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

**KINERJA MANAJERIAL (Variabel Y)**

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	KS	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Perencanaan:</b> Penentuan tujuan kebijakan dan tindakan, penjadwalan kerja, merancang prosedur, serta pemrograman					
<b>2. Investigasi:</b> Mengumpulkan dan menyiapkan informasi untuk catatan dan laporan.					
<b>3. Pengkoordinasian:</b> Tukar menukar informasi dengan orang dibagian devisa yang lain guna mengaitkan dan menyesuaikan program					
<b>4. Evaluasi:</b> Menilai dan mengukur kinerja yang diamati dan dilaporkan (seperti penilaian pegawai)					
<b>5. Pengawasan:</b> Dilakukan pengarahan dan pengembangan terhadap pegawai.					
<b>6. Pemilihan staff:</b> Dilakukan proses wawancara dalam pemilihan pegawai baru.					
<b>7. Perwakilan:</b> Menghadiri pertemuan dengan SKPD Pangkep atau pemerintah daerah lain.					
<b>8. Negoisasi:</b> Usaha anda dalam meningkatkan pendapatan (penjualan asset daerah)					

## B. Hasil Analisis Statistik (SPSS 16.0)

### 1. Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	30	24.00	35.00	29.9667	3.02271
Kinerja Keuangan	30	27.00	40.00	33.4667	3.82130
Valid N (listwise)	30				

### 2. Regresi Linear

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Good Governance <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.450	2.83312

a. Predictors: (Constant), Good Governance

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.723	1	198.723	24.758	.000 <sup>a</sup>
	Residual	224.744	28	8.027		
	Total	423.467	29			

a. Predictors: (Constant), Good Governance

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7.515	5.241		1.434	.163
	Good Governance	.866	.174	.685	4.976	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

### C. Dokumentasi Penelitian



(Kantor Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep)

## D. Surat Keterangan Meneliti dari Tempat/Lokasi Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 08 November 2017

Nomor : 070/674/XI/ KKBKBP / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Daerah Kab.Pangkep  
Di-

Pangkajene

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor:2422/Izn-5/C.4-VIII/IX/37/2017 Tanggal, 31 Oktober 2017 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini

Nama : **INDRIANA**  
No. Stambuk : 10573 04088 13  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akutansi  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud akan melakukan Penelitian di daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“ PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKEP”**

Penelitian dilaksanakan selama 2 (Dua) Bulan mulai tanggal: 16 Nov 2017 s/d 16 Jan 2018

Sehubungan dengan hal tersebut di atas,maka pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) exemplar copy hasil “PENELITIAN” kepada Bupati Pangkep Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Balitbangda.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya,-



**H. LAUKI HASRI, M.Si**

Pembina Tk. I

9601110 198101 1 005

**TEMBUSAN** : Kepada Yth

1. Bupati Pangkep di Pangkajene;
2. Kepala Balitbangda Kab. Pangkep di Pangkajene;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;

**Sdr(i) INDRIANA;**

----- *Pertinggal*-----

### E. Daftar Riwayat Hidup (Biografi Penulis)



Indriana, Lahir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertempat dikampung Sela, 25 Desember 1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Merupakan buah hati dari pasangan Maulana B dan Radiah. Penulis memulai jenjang pendidikan formalnya di SD Negeri 32 Sela kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya pada SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan ke SMK Negeri 1 Bungoro dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun yang samapula (2013) penulis terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Selama menempuh pendidikan diMakassar, penulis aktif dalam berbagai organisasi Internal maupun Eksternal Kampus di antaranya:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (UKM LKIM-PENA) Unismuh Makassar periode 2014-2015 dan 2015-2016 (Anggota Bidang IV Kewirausahaan dan Jaringan)
2. Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Pangkajene dan Kepulauan (IPPM Pangkep) Koordinator Unismuh Makassar
3. Tapak Suci Putera Muhammadiyah Unismuh Makassar 2013
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM):
  - Periode 2014-2015 Departemen Keilmuan
  - Periode 2015-2016 Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman

- Periode 2016-2017 Ketua Bidang IMMawati Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Jenjang kekaderan di IMM:**

- Darul Arqam Dasar tahun (DAD) 2013
  - Darul Arqam Madya (DAM) 2016
  - Latihan Instruktur Dasar (LID) 2016
5. Koordinator Komisariat IMM Unismuh Makassar Periode 2017-2018  
Koordinator Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
  6. Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Pangkep tahun 2017 Ketua Bidang Media dan Komunikasi dan Ketua Bidang IMMawati tahun 2017
  7. Pimpinan Komisariat Bambu Runcing Kabupaten Pangkep 2017 Ketua Bidang Riset dan Keilmuan

**Prestasi yang pernah diraih selama mahasiswa yaitu:**

1. Juara 1 setara Emas lomba poster pada ajang bergengsi PIMNAS Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Halu-Oleo Kota Kendari Sulawesi Tenggara pada 2015 judul “Perilaku Inovatif dan Intensi Berwirausaha Alumni Perguruan Tinggi di Kota Makassar”.
2. Finalis lomba Nasional LKTI di Universitas Sunan Ampel Surabaya 2015 judul ” Implementasi AIDAS Melalui Pasar Syariah untuk Mengatasi Masalah Pemasaran Produk dalam Mewujudkan *Success Entrepreneur Moeslim*”.
3. Finalis lomba KOPERTIS IX SUL\_SEL 2014 bidang IPS judul “Optimalisasi MTR (*Makassarta’* Tidak *Rantasa’*) Melalui *Rubbish Day Fair* dalam Mewujudkan Makassar Bersih Menuju Kota Dunia”

4. Penerimaan dana insentif PKM-GT (Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis) tahun 2015 oleh Dikti judul “*Floating Stall* Segitiga Bermuda” Kota Pangkajene dan Kepulauan Upaya Menarik Wisatawan dalam Menikmati Khas Kuliner Kota Pangkep”.

5. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015

Suka dan duka banyak dilalui, hingga pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.